



**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KAB.
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

**RANCANGAN AWAL
PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
(PERUBAHAN
RENSTRA)
2021-2026**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampau lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diharapkan agar rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi salah satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Pembangunan.

Benteng, 01 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

dokumen ini ditandatangani secara digital

(SAPARUDDIN, S.Sos.,M.M)

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP.19760901 200502 1 004



DAFTAR ISI

Uraian		Hal.
Sampul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Bagan		vii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	11
	1.4. Sistematika Penulisan	12
Bab II	Gambaran Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	14
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	14
	2.2. Sumber Daya Manusia SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	40
	2.3. Kinerja Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	45
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SatPol.PP, Damkardan Penyelamatan	67
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	70
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	70
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan	81
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	84
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	87

Bab IV	Tujuan dan Sasaran	92
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor SatPol.PP, Damkar dan Penyelamatan	92
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	98
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	107
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	149
Bab VIII	Penutup	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 2.2 : Berdasarkan Bidang Tugasnya.....	40
Tabel 2.3 : Berdasarkan Pangkat \ Golongan.....	41
Tabel 2.4 : Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 2.5 : Peralatan (Sarana dan Prasarana).....	42
Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan.....	46
Tabel 2.7 : Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk.....	50
Tabel 2.8 : Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk.....	50
Tabel 2.9 : Jumlah Pos Kamling Per Desa \ Kelurahan.....	51
Tabel 2.10 : Cakupan Penegakan Perda.....	52
Tabel 2.11 : Cakupan Patroli Satpol PP.....	53
Tabel 2.12 : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.....	54
Tabel 2.13 : Cakupan Petugas Linmas.....	55
Tabel 2.14 : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.....	56
Tabel 2.15 : Cakupan Tingkat Waktu Tanggap.....	58
Tabel 2.16 : Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan Realisasi Jumlah Kebakaran	58
Tabel 2.17 : Angka Kriminalitas yang Tertangani.....	59
Tabel 2.18 (T.C 24) : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	60
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	71
Tabel 3.2 : Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satpol PP, dan Penyelamatan.....	73

Tabel 3.3 : Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	79
Tabel 3.4 : Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	82
Tabel 3.5 : Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	83
Tabel 3.6 : Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	86
Tabel 3.7 : Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)...	87
Tabel 3.8 : Skor Kriteria Penentuan Isu -Isu Strategis.....	89
Tabel 3.9 : Nilai Skala Kriteria.....	89
Tabel 3.10 : Nilai Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis.....	90
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	94
Tabel 4.2 :Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.....	96
Tabel 5.1 : Analisis SWOT Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	100
Tabel 5.2 : Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijaksanaan.....	102
Tabel 5.3 : Perubahan Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijaksanaan.....	104
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	113
Tabel 6.2 :Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021)	128
Tabel 6.3 :Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317)	138

Tabel 6.4 : Program Kegiatan Investasi Pemabangunan Kab. Kepulauan Selayar	148
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Dearah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	149
Tabel 7.2 : Penetapan Target Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	150

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi.....	39
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah

(lima tahun) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, satuan kerja perangkat daerah juga menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD sebagai proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 dan ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun teknokratik. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hierarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan menampung berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten kepulauan selayar terkait dengan bentuk dukungan dalam penegakan perda, maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, trantibum, linmas, dan pemadam kebakaran yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Selain itu, Fungsi Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar (Pendekatan Teknoratis).

Adapun penyusunan dan penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan RPJM, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- d. Penetapan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Hubungan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 - 2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2021 -2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026. Selain itu, inventarisasi masukan dari Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan harus diakomodir dalam RPMD, karena RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra bagi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

Hubungan Renstra SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sebagai perencanaan lima tahunan harus dilengkapi dengan

perencanaan tahunan yaitu Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan. Renstra dan Renja saling berkaitan, Renja merupakan penjabaran lebih detail tentang rencana program dan kegiatan pada tahun yang akan berjalan. Rencana program dibuat dengan memperhatikan posisi serta prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran dari program, berisi rangkaian aktivitas yang menunjukkan operasionalisasi suatu program.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mencakup pokok-pokok cakupan fungsi dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasar Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi yaitu Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dan Renstra Satpol PP Provinsi merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi, program dan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam Penyusunan RKA. Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan mengacu pada Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra baiknya memuat tugas dan fungsi Satpol PP serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 ini disusun berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

- dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang RPJMD Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Nomor 113);

37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 676);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Satpol PP, Damkar dan

- Penyelamatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan dalam memahami Renstra ini, maka penyusunan Renstra ini disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Selatan; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 113); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta pemadam kebakaran dalah Menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatanyang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidangpenegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidangpenegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama dan
 - c. Kelompok Fungsional
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satuan menyelenggarakan

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Satuan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Satuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- h. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan

- i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran serta penyelamatan.
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- g. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Satuan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penegakan peraturan

- daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- k. melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - l. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Satuan;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Satuan;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Sub bagian Program

Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja. Uraian Tugas Kepala Sub bagian Program, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Satuan;

- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Satuan;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi satuan;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- l. memfasilitasi penjaringan Inovasi Daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Satuan;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian Tugas Kepala Sub bagian umum, kepegawaian dan hukum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- a. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- g. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- h. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- i. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- m. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Satuan;
- n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- p. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- q. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Satuan;

- r. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai lingkup Satuan;
- s. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Satuan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Uraian Tugas Kepala Sub bagian Keuangan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- a. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- i. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan;
- j. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- k. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- l. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Penegakan Perda

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang penegakan peraturan daerah memiliki fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Penegakan Peraturan Daerah;
- g. menyusun pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, dan kerjasama penegakan peraturan daerah;
- i. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran peraturan daerah;
- j. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan peraturan daerah;
- l. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan peraturan daerah;
- m. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing- masing bidang;
- n. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan peraturan daerah;
- o. melaksanakan optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar dan instansi terkait sesuai kebutuhan penyuluhan
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.

- q. melaksanakan dan mengembangkan mekanisme kerja, tata kerja, dan metode penyuluhan sesuai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan Tugas
- r. melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan instansi terkait
- s. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di bidang penegakan peraturan daerah
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- w. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan. Uraian tugas kepala seksi pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pembinaan peraturan daerah;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah;
- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang;
- i. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah;
- k. mengajukan usulan penindakan dan penertiban melalui kepala bidang dan diteruskan ke Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. melakukan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan dengan institusi terkait;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

penyelidikan dan penyidikan. Uraian tugas kepala seksi penyelidikan dan penyidikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- h. melakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melakukan pengembangan Kapasitas dan karier penyidik pegawai negeri sipil;
- k. melakukan dan mengajukan penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- l. menyusun rencana pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- m. menerima pelaporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara dalam dilanjutkan ke pengadilan melalui koordinator wakil satuan PPNS;
- n. melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyitaan barang terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnya.

- o. melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran penegakan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan instansi terkait;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum. Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan fungsi, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional ketentraman, ketertiban, pengamanan acara protokoler dan obyek vital serta pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. melaksanakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengerahan pengamanan (pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah), pengendalian dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- k. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan dan mempersiapkan perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
- m. melaksanakan pertolongan, rehabilitasi dan relokasi akibat bahaya dan korban bencana
- n. menempatkan pos jaga dan pengamanan kesiagaan keamanan lingkungan.

- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan satuan perlindungan masyarakat
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya

2.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengendalian. Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi Tugas dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis operasi penertiban dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masing-masing bidang Dalam dilakukan operasi penertiban;
- i. melaksanakan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- j. melaksanakan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- k. mengadakan Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
- l. melakukan koordinasi kegiatan operasi dan pengendalian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- m. mengordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang operasi dan pengendalian;
- n. melaksakan koordiansi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kerjasama. Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan Kerjasama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- i. menyusun standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
- k. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan;
- l. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
- m. menganalisis penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan serta dengan instansi terkait;
- o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerjasama;

- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan Penyelamatan. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang pemadam Kebakaran, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. menyusun pedoman, petunjuk teknis inspeksi proteksi kebakaran, penyuluhan publik mengenai kebakaran, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- j. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- k. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- l. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.
- m. melaksanakan pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, penyelamatan.
- n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pemadaman dan evakuasi
- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan Seksi Pemadaman dan Evakuasi
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- r. menilai kinerja pegawai aparaturnya sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan. Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- j. melaksanakan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi;
- k. melakukan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- l. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- m. melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan kebakaran.

- n. melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran seperti pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, penegakan peraturan, dan lain-lain.
- o. melaksanakan pengawasan pengendalian operasional kegiatan inspeksi proteksi kebakaran;
- p. melaksanakan koordinasi kegiatan pencegahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait
- q. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. melaksanakan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- h. menyusun Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan penyelamatan;
- i. melaksanakan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. melaksanakan Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- k. menyusun Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- m. menyusun rencana Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan;
- n. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan sarana dan prasarana;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- p. melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
- q. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan/pemadaman/ penyelamatan kebakaran;
- r. melaksanakan koordinasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana;

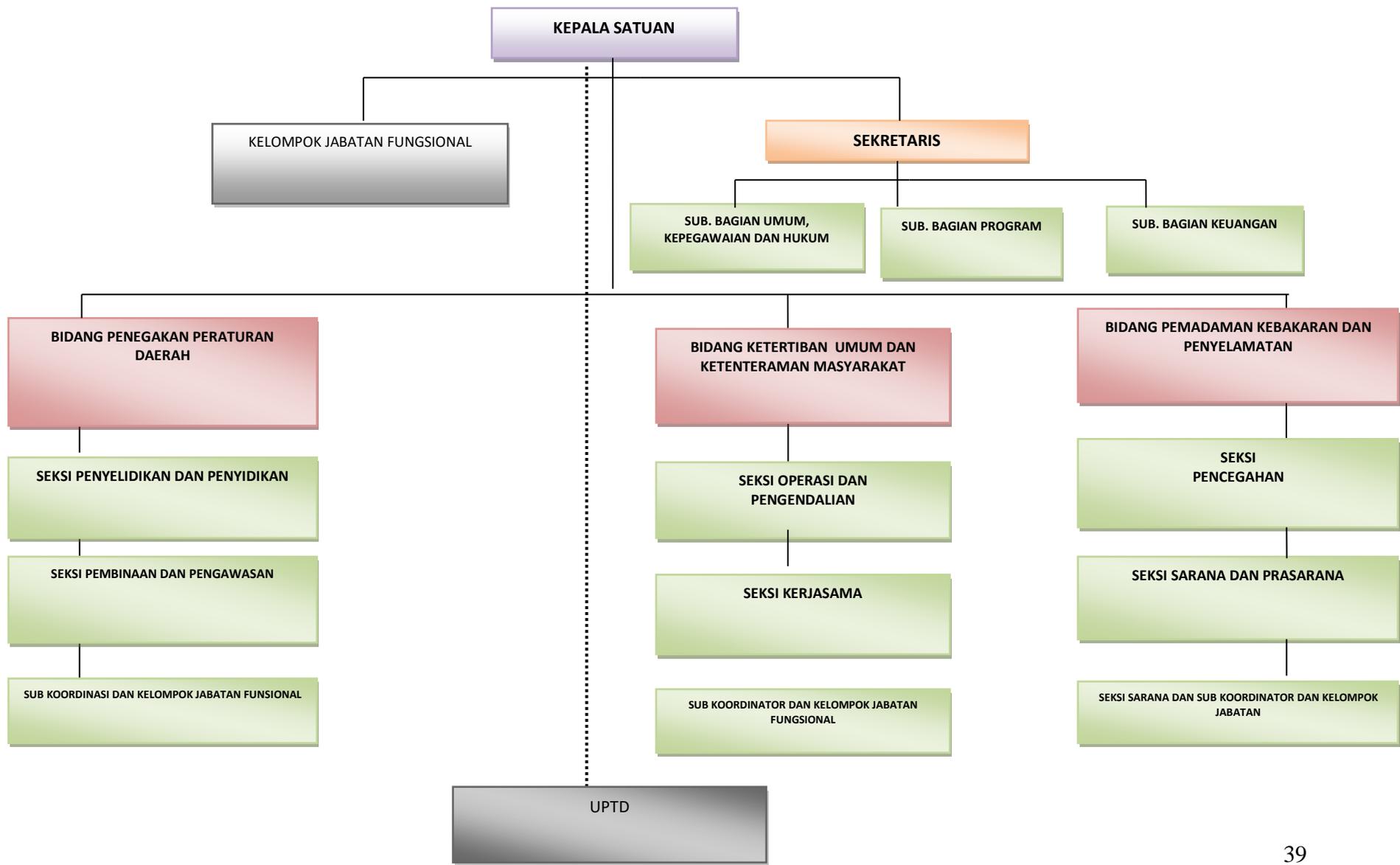
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi bagan 2.1 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan pada masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan salah satu unsur Penunjang Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan, membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar.

Keadaan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan digambarkan sebagai berikut:

2.2.1.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	Strata Dua (S2)	5 Orang	PNS
2	Strata 1(S1)	46 Orang	17 Orang PNS, 29 Orang (NonPNS)
3	D3	5 Orang	NonPNS
4	D2	7 Orang	Non PNS
5	SLTA/Sederajat	341 Orang	25 Orang (PNS), 316 Orang (NonPNS)
6	SLTP/Sederajat	10 Orang	Non PNS
7	Paket C	1 Orang	PNS
8	Paket C	33 Orang	33 Non PNS
JUMLAH		448 Orang	

2.2.1.2 Berdasarkan bidang tugasnya

Table 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasnya Tahun 2023

No	Bidang Tugas	Jumlah	Ket
1.	Kepala Satuan	1 Orang	Pembina IV/a
2.	Sekretaris	1 Orang	Pembina / III.d
3.	Kasubag Program	1 Orang	Penata / III.c
4.	Kasubag Keuangan	1 Orang	Penata/ III.c
5.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1 Orang	Penata Muda Tk.I / IIIb

6.	Kepala Bidang Penegakan Perda	1 Orang	Pembina IV/a
7.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	1 Orang	Penata Tk.I /III.d
9.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
10.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	1 Orang	Penata TK.I/III.b
11.	Kepala Seksi Kerjasama	1 Orang	Penata /III.c
12.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	1 Orang	Pembina IV/a
13.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
14.	Kepala Seksi Pencegahan	1 Orang	Penata Tk.I/III.d
15.	Kepala Upt Bontomatene	1 Orang	Penata/IIIc
16.	Kepala Upt Bontosikuyu	1 Orang	Penata Muda Tk.I,III/b
17.	Fungsional Tertentu	32 Orang	1 Penata Iv/a, 2 Penata III/c, 3 Penata Muda III/a, 1 Penata muda Tk.I,III/b, 2 Penata Muda Tk.I,1 III/a, 11 Pengatur Tk.I,III/a, 4 Pengatur Tk.I.II/d, 3 Pengatur/IIc, 1 Pengatur Muda Tk.I,II/c, 2 Pengatur Muda TK.I/IId
JUMLAH		48 Orang	

3.2.1.1 Berdasarkan Pangkat/Golongan

Table 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina / IV.a	1 orang	Kasat
2	Pembina/ III.d	1 orang	Sekretaris
3	Pembina/ IV.a	2 orang	Kabid/Fungsional
4	Penata Tk.I/ III.d	3 orang	Kabid/Kasi
5	Penata / III.c	9 orang	Kasi/Kasubag/Kepala UPT
6	Penata Muda Tk. I/III.b	2 orang	Kasubag/Fungsional Tertentu
7	Penata Muda/ III.a	3 orang	Fungsional Tertentu
8	Pengatur Tk.I /II.d	5 orang	Fungsional Tertentu
9	Pengatur / II.c	4 orang	Fungsional Tertentu
10	Pengatur Muda Tk.I/II.c	1 orang	Fungsional Tertentu

11	Pengatur Muda Tk.I/II.d	2 orang	Fungsional Tertentu
12	Pengatur Tk.I/II.a	11 orang	Fungsional Tertentu
13	Pengatur Tk.I/III.a	1 orang	Fungsional Tertentu
14	Penata Muda Tk.I/III.a	2 orang	Fungsional Tertentu
15	Penata, III/d	1 orang	Fungsional Tertentu
JUMLAH		48 orang	

4.2.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Table 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	KET.
1	Laki-Laki	379 Orang	40 PNS, 339 Non PNS
2	Perempuan	69 Orang	8 PNS, 61 Non PNS
JUMLAH		448 Orang	

4.2.1.2 Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Dalam mendukung tugas administrasi dan operasional di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sarana dan Prasarana, yaitu :

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2023

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	7 unit	Kantor, Pagar dan Khusus Merokok
2	Truck + Attachment	1 unit	Baik
3	Pick Up	3 unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
4	Mobil Pemadam	8 unit	6 Baik, 2 Rusak Berat
5	Mini Bus	1 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	15 unit	Baik
7	P.C Unit/Komputer	11 unit	6 Baik, 5 Rusak Berat
8	Notebook	1 unit	Rusak Berat
9	Printer	28 unit	13 Baik, 15 Rusak Berat
10	Laptop	19 unit	12 Baik, 3 Rusak Berat
11	Meja Biro	27 unit	21 Baik, 6 Rusak Berat
12	Meja Kerja	32 unit	27 Baik, 5 Rusak

			Berat
13	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
14	Handy Cam	1 unit	Rusak Berat
15	Kamera Elektronik	6 unit	4 Baik, 2 Rusak Berat
16	Lemari Arsip untuk Dinamis	12 unit	2 Baik, 10 Rusak Berat
17	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
18	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1 unit	Baik
19	Lemari Kayu	5 unit	1 Baik, 4 Rusak Berat
20	AC	10 unit	Baik
21	Pesawat Telpon	1 unit	Rusak Berat
22	Kursi Putar	10 Unit	4 Baik, 6 Rusak Berat
23	Kursi Tamu	1 unit	Rusak Berat
24	Televisi	9 unit	5 Baik, 4 Rusak Berat
25	Peralatan Antena UHF Lain-lain	2 unit	Baik
26	Lemari ES	1 unit	Baik
27	Kapal Patroli Pantai	2 Unit	Rusak Berat
28	Handy Talky (HT)	49 unit	18 Baik, 31 Rusak Berat
29	Alat Komunikasi Lain-lain	4 unit	4 Rusak Berat
30	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2 unit	2 Rusak Berat
31	Power Suplai	1 unit	Rusak Berat
32	Kursi Rapat	214 unit	174 Baik, 40 Rusak Berat
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 unit	Baik
34	Dispencer	3 unit	Rusak Berat
35	Mesin Ketik Manual Standar (14 -16)	4 unit	Rusak Berat
36	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 unit	Rusak Berat
37	Lemari Besi	6 unit	Baik
38	Rak Kayu	1 unit	Rusak Berat
39	Faxmile	1 unit	Rusak Berat
40	Brand Kas	1 unit	Baik
41	Lemari Kaca	1 unit	Baik
42	Kompor Gas	1 unit	Baik
43	Jam Elektronik	2 unit	Rusak Berat

44	Sofa	1 unit	Baik
45	Kaca Bening	2 unit	Rusak Berat
46	Radio	5 unit	Rusak Berat
47	Sound Sistem	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
48	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
49	Layar Proyektor	1 unit	Baik
50	Tameng Fiber/Mika	30 unit	28 Baik, 2 Rusak Berat
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Baik (Mako)
52	Konstruksi Pagar	1 unit	Baik
53	Filing Besi	7 unit	Baik
54	Mesin Absensi	1 unit	Baik
55	Kursi Lipat	10 unit	Rusak Berat
56	Megaphone	2 unit	Baik
57	Slide Proyektor	5 unit	3 Baik, Rusak Berat 2
58	Alat Keamanan (Tabung Apar)	17 unit	Baik
59	Alat Perlindungan Lain – lain (APAR 6 Kg)	8 unit	Baik
60	Lampu Sirine Tiga Warna	3 unit	Baik
61	Alat Perlindungan Lain – Lain (Baju Anti Api)	1 unit	Baik
62	Kursi Kerja	16 unit	Baik
63	Rak TV	3 unit	Baik
64	Bangunan Gedung Kantor Lain – Lain (Bangunan Khusus Merokok)	4 unit	Mako Bontoharu Buki
65	Bangunan Gedung Kantor Lain – lain (Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran)	2 unit	Mako
66	Mesin Pompa Air	6 unit	Baik
67	Alat Pemadam Kebakaran Lain- lain (Nozzel)	3 unit	Baik
68	Selang Penyemprot Air	6 unit	Baik
69	Selang Penghisap Air	2 unit	Baik
70	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
71	Meja Kerja Pejabat Lain –	2 unit	Rusak Berat

	lain		
72	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2 unit	Baik
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Baik

Sebagaimana pemaparan di atas, ditinjau dari segi kuantitas terlihat bahwa jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan *belum memadai* mengingat bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta tanggap terhadap bencana kebakaran, yang lingkup tugasnya mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara semakin banyaknya Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung Penegakannya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, yang mana tidak seimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ditambah lagi tugas di bidang pemadam kebakaran yang harus siap siaga ketika kebakaran terjadi.

4.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengedepankan kepada indikator kinerja kunci atau menggunakan standar pelayanan dengan faktor kunci keberhasilan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	-	34%	-	19,88	23,41	26,94	30,47	34,00	13,22	13,38	11,69	19,02	19,92	0,66	0,57	0,43	0,62	0,58
2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk	-	46,83%	-	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83	46,65	46,23	45,72	45,41	45,37	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96
3	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	0,34%	-	0,14	0,31	0,31	0,34	0,34	0,14	0,31	0,31	0,34	0,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	1,48%	-	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,45	1,45	1,45	1,46	1,47	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	-	1 Kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	100%	96,08%	-	89,29	89,29	96,08	96,08	96,08	82,5	89,29	100	100	100	0,92	1,00	1,04	1,04	1,04

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(ketertiban, ketentraman, keindahan)																		
7	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	91,11%	40%	-	40	40	40	40	40	10,1	10,1	18,5	18,5	33,67	0,28	0,28	0,43	0,43	0,65
8	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	11,95%	90%	-	90	90	90	90	90	30	30	42	62	80	0,33	0,33	0,46	0,68	0,88
9	Persentase Penegakan PERDA	33%	100%	-	100	100	100	100	100	93,75	100	100	100	100	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	-	-	0,070	0,065	0,035	0,0040	-	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65	0,37	0,36	0,6	0,22	0,10

Tabel 2.6 di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja utama masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada pula yang melampaui target. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dengan capaian kinerja 104%.
2. Capaian kinerja yang sesuai target 100% ditunjukkan pada indikator Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan, Cakupan Patroli Petugas Satpol PP, dan Persentase Penegakan Perda.
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator :
 - a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk, dengan capaian kinerja sebesar 58,6%.
 - b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk, dengan capaian kinerja 96,8%.
 - c. Cakupan Petugas Linmas, dengan capaian indikator 99%.
 - d. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, dengan capaian indikator 65,15%.
 - e. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dengan capaian indikator 88,89%.

- f. Angka Kriminalitas yang Tertangani, dengan capaian indikator 10,65%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator yang telah mencapai target, yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan yang diikuti seluruh jajaran OPD di dalam pencapaian target indikator kinerja.
2. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan OPD teknis serta jajaran TNI/Polri, dan stakeholder terkait di dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berkenaan dengan beberapa indikator yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Minimnya dukungan SDM aparatur Satpol PP yang ada.
2. Keterbatasan Personil Satpol PP dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan personil linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Keterbatasan anggaran terhadap indikator-indikator yang dilakukan.
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung program/kegiatan.

Analisa atas pencapaian kinerja pelayanan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk

Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah Polisi Pamong Praja, maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.7
Rasio Jumlah Satpol PP Per 10.000 Penduduk

2. Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jum. Polisi Pamong Praja	Orang	174	178	183	258	273
Jumlah Penduduk	Orang	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
Rasio	Per 10.000 Penduduk	13,22	13,38	11,69	19,02	19,92

Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban

masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 2.8
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	Orang	614	614	614	616	622
Jumlah Penduduk	Orang	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
Rasio	Per 10.000 Penduduk	46,65	46,23	45,72	45,41	45,37

Linmas yang ada saat ini adalah jumlah berdasarkan TPS yang hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu, kedepannya akan dimaksimalkan peran serta satuan Linmas dalam membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil akibat dari bencana, serta ikut membantu dalam memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

3. Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos kamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos kamling di setiap desa/kelurahan.

Tabel 2.9
Jumah Pos Kamling Per Desa / Kelurahan

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pos Kamling	Unit	12	27	27	30	30
Jumlah Desa /Kelurahan		88	88	88	88	88
Rasio		0,14	0,31	0,31	0,34	0,34

4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di dapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\Sigma \text{pelanggaran perda/perkada yg diselesaikan}}{\Sigma \text{pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/ dipantau}} \times 100\%$$

Cakupan penyelesaian pelanggaran perda adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana tahun pencapaian yakni tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 68 kasus sehingga persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% dan tahun 2017 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 364 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% dan tahun 2018 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 173 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100% serta tahun 2019 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 118 kasus persentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus yang

diselesaikan adalah sebanyak 108 kasus presentase pelanggaran perda juga sebesar 100%.

Tabel 2.10
Cakupan Penegakan Perda

5. C a k U P a n	Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Penyelenggaraan						
	Penegakan Perda dan	Kasus	68	364	173	118	108
	Perkada						
	Jumlah Pelanggaran						
	Perda dan Perkada	Kasus	68	364	173	118	108
	Rasio	%	100	100	100	100	100

Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Patroli adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana untuk tahun 2016 cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sehari untuk semua wilayah kecamatan dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{kelomp. patroli dikalikan 1 patroli dlm sehari}}{\sum \text{kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$$

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- Antar batas wilayah; dan
- Tempat keramaian/hiburan

Apabila telah tercipta kondisi 1 (satu) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Untuk tahun 2020, pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap indikator tersebut adalah sebesar 100% (1 kali dalam sehari). Jumlah tersebut diperoleh dari pelaksanaan patroli wilayah yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbagi kedalam 11 Kelompok patroli untuk 11 kecamatan.

Tabel 2.11
Cakupan Patroli Satpol PP

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya kelompok patroli dikalikan 1 kali patroli dalam sehari	Kelompok	11	11	11	11	11
Banyaknya kelompok kecamatan (jml kecamatan)	Kecamatan	11	11	11	11	11
Rasio	%	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1 kali)	100 (1kali)

penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3

yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada tahun 2016-2020, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) sebanyak 100%.

Tabel 2.12
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

7. (Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	66	325	100	100	100
k	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	80	364	100	100	100
t	Rasio	%	82,50	89,29	100	100	100

a
n petugas linmas di kabupaten

Cakupan petugas linmas di kabupaten adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah satuan linmas dibagi dengan jumlah RT :

$$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{satuan}}{\sum \text{RT}}$$

Perubahan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017 diikuti dengan beralihnya bidang perlindungan masyarakat (Linmas) yang sebelumnya berada pada Kesbangpol ke

Satuan Polisi Pamong Praja. Data Linmas yang diperoleh berdasarkan jumlah TPS dan hanya bertugas saat Pilkada, Pileg dan Pemilu. Pada tahun 2016 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Pada tahun 2017 jumlah petugas linmas tetap, yaitu sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Pada tahun 2018 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 614 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,45 %. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 616 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,46 %, Pada tahun 2020 jumlah petugas linmas adalah sebanyak 622 orang dari total rumah tangga 422 sehingga persentasenya mencapai 1,47 %.

Tabel 2.13
Cakupan petugas linmas

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Satuan Linmas	Orang	614	614	614	616	622
Jumlah RT	RT	422	422	422	422	422
Rasio		1,45	1,45	1,45	1,46	1,47

an Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran atau disebut penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik

urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pada tahun 2017, sehingga Data SPM Pemadam Kebakaran Tahun 2011-2015 diperoleh dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Pada tahun 2016-2017 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 154 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 11,35 %. Sedangkan tahun 2018-2019 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 238 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran mencapai 17,53 %.

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

jumlah luas WMK		137	137	251	251	457
luas potensi kebakaran		1357	1357	1357	1357	1357
Rasio	%	10,1	10,1	18,5	18,5	33,67

Pada tahun 2020 jumlah luas WMK (luas lingkaran) sebanyak 353,6 dan luas potensi kebakaran sebanyak 1357, sehingga Cakupan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 26,06% karena wilayah manajemen kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur serta belum adanya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

9. Tingkat Waktu Tanggap

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian

kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK :

Pada tahun 2011-2015, tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran (saat masih bergabung dengan BPBD) mencapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap yaitu sebanyak 30 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 30 kasus. Pada tahun 2018, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 42 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 42 kasus. Pada tahun 2019, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 62 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 62 kasus. Sedangkan Pada tahun 2020,

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

ah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 80 kasus.

Tabel 2.15
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jumlah Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap		12	13	17	49	36
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkau WMK		42	44	41	79	45
Rasio	%	30	30	42	62	80

Tabel 2.16
Cakupan Tingkat Waktu Tanggap Berdasarkan Target dan Realisasi Jumlah Kebakaran

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Target Kasus kebakaran di WMK		90	90	90	90	90
Jumlah Realisasi kasus kebakaran di WMK		30	30	42	62	80
Rasio	%	33,33	33,33	46,67	68,89	88,89

10. Angka Kriminalitas yang tertangani

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian.

Tabel 2.17
Angka Kriminalitas yang tertangani

Bidang/ Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas yg tertangani	Kasus	79	59	8	29	12
Jumlah Kriminalitas	Kasus	211	161	127	130	110
Rasio	%	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	42,600,000	67,590,224	60,000,000	72,000,000	72,000,000	32,327,004	65,057,464	54,695,146	69,726,907	69,961,176	76%	96%	91%	97%	97%	256,590,224	235,798,756
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,000,000	251,700,000	160,000,000	171,000,000	193,227,820	108,949,500	244,239,785	159,950,305	170,861,817	192,931,686	90%	97%	100%	100%	100%	742,345,564	722,587,744
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	101,000,000	231,700,000	150,000,000	171,000,000	193,227,820	96,249,500	231,014,785	149,950,305	170,861,817	192,931,686	95%	100%	100%	100%	100%	692,345,564	686,662,744
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Aset Tak Benuaid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	12,700,000	9,975,000	10,000,000	-	-	64%	100%	100%	-	-	33,333,333	26,008,333
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	10,000,000	-	-	-	-	3,250,000	-	-	-	-	33%	-	-	-	10,000,000	3,250,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	733,011,367	3,010,249,500	667,280,000	807,550,000	573,856,400	706,692,144	2,302,235,688	625,073,189	786,158,675	567,948,166						5,332,862,147	5,133,749,329
Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten atau Kota	372,454,367	2,139,017,000	367,280,000	538,105,000	318,202,000	369,098,667	2,043,187,488	358,043,850	524,203,617	313,505,386	99%	96%	97%	97%	99%	3,480,496,767	3,357,234,699
Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	242,850,000	1,513,658,000	217,580,000	192,405,000	184,650,000	241,035,000	1,452,565,000	215,097,650	183,981,250	181,170,000	99%	96%	99%	96%	98%	2,203,423,000	2,128,912,900
Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa	-	75,000,000	49,700,000	33,843,000	-	-	74,955,000	49,700,000	33,743,000	-	-	100%	100%	100%	-	135,981,000	135,902,667
Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	100%	-	10,000,000	10,000,000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	129,604,367	550,359,000	100,000,000	301,857,000	133,552,000	128,063,667	515,667,488	93,246,200	296,479,367	132,335,386	99%	94%	93%	98%	99%	1,108,530,767	1,059,923,799
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Layanan dalam Rangka dampak Penegakan Peraturan daerah dan Perkada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	360,557,000	871,232,500	300,000,000	269,445,000	255,654,400	337,593,477	859,048,200	267,029,339	261,955,058	254,442,780	94%	99%	89%	97%	100%	411,377,780	396,013,771
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	105,975,000	296,494,000	-	-	-	99,617,100	287,030,700	-	-	-	94%	97%	-	-	-	80,493,800	77,329,560

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengawasan Atas Kepatutan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	95,400,000	198,660,000	-	49,445,000	49,445,000	93,960,000	197,604,000	-	49,409,000	48,820,000	98%	99%	-	100%	99%	78,590,000	77,958,600	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	159,182,000	376,078,500	300,000,000	220,000,000	206,209,400	144,016,377	374,413,500	267,029,339	212,546,058	205,622,780	90%	100%	89%	97%	100%	252,293,980	240,725,611	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	384,150,700	818,783,000	120,117,500	660,117,600	-	183,840,000	768,455,507	119,553,000	657,968,600	-	-	-	-	-	396,633,760	396,633,760	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	294,150,700	743,783,000	94,940,000	520,505,000	-	104,975,000	696,628,500	94,525,000	519,186,500	0%	36%	94%	100%	100%	330,675,740	330,675,740	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,900,000	-	-	-	100%	100%	-	-	12,000,000	12,000,000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	66,275,000	85,840,000	94,940,000	470,505,000	-	55,975,000	83,396,500	94,525,000	469,186,500	-	84%	97%	100%	100%	143,512,000	143,512,000	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	300,000,000	-	-	-	-	284,257,000	-	-	-	-	-	95%	-	-	60,000,000	60,000,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	197,875,700	297,943,000	-	50,000,000	-	19,000,000	269,075,000	-	50,000,000	-	10%	90%	-	-	109,163,740	109,163,740
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	6,000,000	6,000,000
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigasi Kejadian Kebakaran	-	30,000,000	50,000,000	15,177,500	69,425,800	-	18,865,000	46,827,007	15,103,000	68,720,300	-	63%	94%	100%	99%	32,920,660	32,920,660
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	30,000,000	50,000,000	15,177,500	69,425,800	-	18,865,000	46,827,007	15,103,000	68,720,300	-	63%	94%	100%	99%	32,920,660	32,920,660
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	-	60,000,000	25,000,000	10,000,000	70,186,800	-	60,000,000	25,000,000	9,925,000	70,061,800	-	100%	100%	99%	100%	33,037,360	33,037,360
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	60,000,000	-	10,000,000	55,000,000	-	60,000,000	-	9,925,000	54,875,000	-	100%	-	99%	100%	25,000,000	25,000,000
Pembetulan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	25,000,000	-	15,186,800	-	-	25,000,000	-	15,186,800	-	-	100%	-	100%	8,037,360	8,037,360
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,635,575,050	7,183,696,924	10,208,008,700	6,339,874,400	6,435,924,633	2,560,949,189	6,833,900,352	9,658,762,476	6,092,102,837	6,401,544,717						6,560,615,941	6,545,690,769

Dari tabel 2.18 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP, Damkar dan penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2016-2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang diemban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, sehingga rasio antara realisasi dan anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat dikatakan baik (2016-2020). Pada tahun 2016, rasio antara anggaran dan realisasi mencapai 94%. Pada tahun 2017 mencapai 89%, pada tahun 2018 mencapai 94%, pada tahun 2019 mencapai 94% dan yang paling memiliki rasio tertinggi adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 99%.

Adapun faktor penunjang yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tersebut adalah :

1. Adanya program-program kegiatan yang pertumbuhannya sulit dihitung karena anggarannya hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja.
2. Pada tahun 2020 merupakan rasio tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan meskipun terjadi *refocussing* serta pengembalian anggaran akibat terjadinya Covid-19, tetapi program dan kegiatan tetap dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata rasio kegiatan yang mencapai >95%.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, adalah :

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya dukungan dari aparat dan masyarakat;
3. Adanya tenaga bantuan perlindungan masyarakat yang membantu tugas Satpol PP di dalam memelihara ketentraman masyarakat.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.2.1 Analisis Renstra K/L, Analisis Renstra Provinsi, Analisis RTRW dan Analisis KLHS dalam Capaian Kinerja

Hasil analisis terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri yaitu manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran belum optimal dan penyelenggaraan fungsi

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP juga belum Efektif. Hasil analisis terhadap Renstra Provinsi yaitu adanya kendala dalam pencapaian tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 dikarenakan sedikitnya jumlah PPNS dan minimnya kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan oleh staf yang bertugas sebagai PPNS dalam penyelesaian pelanggaran K3.

Hasil analisis terhadap RTRW yaitu telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam pembangunan pos pantau trantibum dan kebijakan dalam pembangunan pos keamanan lingkungan. Selanjutnya, hasil analisis terhadap KLHS yaitu mengurangi resiko bencana kebakaran dan meningkatkan lingkungan yang nyaman dan aman di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, yang salah satunya merupakan kualitas pemikiran masyarakat selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan. Oleh karena itu, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berusaha dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mendapat dukungan dari Bupati dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.2.2 Tantangan dan Peluang

Adapun Tantangan (*Treath*) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:

1. Pemakaian anggaran yang belum maksimal akan menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran berikutnya;
2. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semakin kompleks;

3. Benturan tugas dengan aparat lain yang akan menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan tugas;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
5. Sumber Daya Manusia dan profesionalisme personil yang harus selalu ditingkatkan dalam mengawal Perda dan Peraturan Bupati serta dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran.

Adapun Peluang (*Opportunity*) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, yaitu:

1. Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah satu-satunya lembaga teknis daerah yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Pemadam Kebakaran menjadi lembaga yang melaksanakan sub-urusan pemadam kebakaran yang sangat memegang peranan penting dalam menjaga masyarakat dari bahaya kebakaran.
5. Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataupun di daerah lain.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan pendekatan preemtif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
- b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya SDM aparatur dalam pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Jumlah Personil Organik (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja. b. Keterbatasan SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum ada formasi untuk pengangkatan secara khusus dari pemerintah pusat untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (CPNS/P3K) b. Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar SATPOL PP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Peraturan Daerah.	
2.	Masih rendahnya penegakan Perda dan Perkada	<p>a. Keterbatasan PPNS Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada, sehingga masih adanya tindak kriminalitas</p>	<p>a. Minimnya Biaya Operasional Penegakan Perda, khususnya Biaya Penyidikan</p> <p>b. Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perkada yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kab. Kepulauan Selayar</p> <p>c. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada</p>
3	Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap desa/kelurahan	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran SKPD.
4	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	a. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran	<p>a. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.</p> <p>b. Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran.</p>
5	Masih rendahnya kualifikasi personil pemadam kebakaran yang sesuai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran	a. Minimnya kualitas SDM personil Pemadam Kebakaran dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil	<p>a. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi</p> <p>b. Terbatasnya anggaran pelatihan</p>

Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel identifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Penegakan Perda	Sesuai (=)	Penegakan perda sudah terealisasi dengan baik. Hal itu terlihat dari jumlah penyelenggaraan penegakan perda dan perkara sudah sesuai dengan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang terjadi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tupoksi satpol PP, damkar dan penyelamatan dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Melampaui (>)	Pada dasarnya, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat lebih tinggi capaiannya walaupun sudah melampaui target, karena pada tahun 2018-2020 capaian sudah melebihi dari target. Namun anggaran dalam penyelesaian pelanggaran K3 belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya koordinasi kerja sama yang baik antara TNI, Polri di dalam pelaksanaan tugas b. Adanya dukungan dari aparat ataupun masyarakat

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target yang rendah dikarenakan minimnya anggaran, sehingga belum optimalnya pendataan petugas linmas dan jumlah petugas linmas belum terpenuhi di setiap desa/kelurahan	Adanya kebijakan dan Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi di dalam pencapaian target indikator kinerja
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Belum Tercapai (<)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih rendah karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tiap tahunnya. Hal itu dikarenakan masih terdapat kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi	<p>a. Adanya peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p> <p>a. Adanya dukungan pemerintah dalam pembentukan UPT</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Interpretasi : Belum Tercapai (<), Sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Belum Tercapai (<)	Rasio antara realisasi dan target tiap tahun yang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya terpenuhi daerah Wilayah Manajemen Kebakaran dikarenakan belum semua kecamatan terdapat UPT Pemadam Kebakaran, yang menyebabkan butuh waktu dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran	Pentingnya keberadaan UPT di setiap Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Proses telaah visi dan misi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi adalah gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Pernyataan visi juga merupakan ungkapan Presentasi keyakinan terhadap masa depan organisasi, dengan demikian visi harus menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan Visi Kepala Daerah tersebut mengandung dua makna, yaitu pertama Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan makna kedua yaitu Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” sebagai gambaran kondisi daerah yang diharapkan pada akhir periode tahun 2026, ditandai dengan tiga pilar dan gerbangsari, yaitu:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Terimplementasinya Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Kaitan Gerbangsari dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu terletak pada tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kab. Kepulauan Selayar.

Indikator yang akan dicapai pada akhir periode 2026 yang berdampak pada pembangunan daerah demi terwujudnya Visi “Bandar Maritim” adalah sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam misi, yaitu :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditunjukkan pada visi Bupati “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” dengan misi ke-1 yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar di atas, maka di bawah ini dipaparkan faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar diantaranya;

Tabel 3.3
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA				
Visi				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Faktor	
1	2	3	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1. Pelayanan SDM aparatur yang kurang mampu menunjang Operasional Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Mayoritas Personil Satpol.PP dan Damkar adalah Pegawai Harian Lepas/ PTT	Adanya dukungan dalam Peningkatan Status PTT menjadi ASN dan P3K.
		2. Perlunya peningkatan penegakan Perda dan Perkada	1. Ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol.PP masih sangat kurang	1 Memaksimalkan dukungan kepada PPNS yang ada
			2. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat	2 Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mendukung

			pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	tupoksi satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
		3. Belum optimalnya pendataan petugas linmas di setiap desa/kelurahan	Kurangnya Anggaran Operasional Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat
		4. Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kebakaran	Adanya dukungan dari aparat maupun masyarakat
		5. Perlunya peningkatan kualifikasi personil pemadam kebakaran sesuai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	5. Belum ada pelatihan secara khusus untuk mendapatkan keahlian dan sertifikasi sesuai standar kualifikasi 6. Minimnya Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur	Dukungan dari Pemerintah dalam mengikuti Pelatihan Keahlian

Berdasarkan analisa terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan penyelamatan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kab. Kepulauan Selayar yaitu :

- a. Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.

- b. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengangkat Status Personil Satuan Polisi pamong Praja dari PTT menjadi ASN dan P3K.
- c. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.
- d. Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Sedangkan analisa visi dan misi yang mempengaruhi faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
- c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat belum optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya kuantitas Satpol PP yang profesional dan Memadai	SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya personil Satpol PP yang mengikuti diklat dasar Satpol PP terkait ketertarikan dan ketertiban umum	Dukungan dari penentu kebijakan untuk terus belajar menjadi SDM yang tangguh dalam menciptakan ketertarikan dan ketertiban umum
2.	Terwujudnya persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	Terbatasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal.	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
3.	Meminimalisir tingkat waktu tanggap di atas 15 menit penanganan	Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran	Sarana dan prasarana dalam menangani bencana kebakaran belum optimal	Adanya dukungan dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan anggaran
4.	Terwujudnya perlindungan di masyarakat	Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai.	Tidak tersedianya Anggaran Pembinaan Perlindungan Masyarakat disebabkan keterbatasan Anggaran SKPD.	Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat.
5.	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam turut	Belum optimalnya sosialisasi tentang Penegakan Perda dan Perkada yang	Dukungan Kebijakan Anggaran dan pemenuhan Sarana Prasarana Pendukung

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kep. Selayar	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
		mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	berdampak pada gangguan trantibum	Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
6.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi norma hukum	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan perkada	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai tim penegak perda dan perkada	Regulasi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- b. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
- c. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

Analisa telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Wilayah terhadap keterlibatan langsung Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Telaahan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Kebijakan Pembangunan Pos Pantau Trantibum	Belum adanya pembangunan pos trantibum di semua kecamatan	Adanya Pembangunan Pos Pantau Trantibum akan memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tenrtram di tengah-tengah masyarakat
2	Kebijakan Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	Jumlah pos kamling masih terbatas	Pembangunan Pos Kamling memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat
3	Kebijakan Pembangunan UPT. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belum adanya penempatan UPT di semua lokasi Kecamatan	Pembangunan UPT memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tentram dan tanggap bencana kebakaran di tengah-tengah masyarakat

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintgrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan

kabupaten. Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya. Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.7
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Resiko Bencana	Menjadikan lingkungan aman, nyaman dan tentram yang berkaitan dengan tupoksi Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengurangan resiko bencana kebakaran	Adanya regulasi yang jelas
2	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membangun OPD yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Kuantitas dan kualitas satpol PP yang belum memadai dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan	Dukungan dari penentu kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan SKPD, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, Renstra K/L, dan Renstra SKPD Provinsi serta telaahan RTRW dan LKHS bagi pelayanan SKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan Isu-Isu Strategis guna mendukung agenda utama pembangunan daerah dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS masih rendah;
2. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkara;
3. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk;
5. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;
6. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
7. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.

Isu-isu strategis pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, sehingga dirumuskan isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi satpol PP, damkar dan penyelamatan. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Adapun pembobotan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Tingkat kesulitan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	25

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	10	10	15	5	15	25	80
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	20	10	20	5	15	25	95
3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	10	10	20	10	15	25	90
4	Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk	20	5	20	5	10	25	85
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	15	5	20	10	15	20	85

6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	20	10	20	5	5	25	85
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	10	10	20	5	15	25	85

Tabel 3.10
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Kemampuan personil Satpol PP Berkompetensi PPNS masih rendah	80	11,4
2	Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada	95	13,6
3	Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	90	12,8
4	Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk	85	12,1
5	Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas	85	12,1
6	Pos PMK yang sesuai WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi	85	12,1
7	Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai Standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan	85	12,1

Berdasarkan Pembobotan yang dilakukan, adapun Isu-Isu Strategis yang paling prioritas, yaitu:

1. Adanya upaya peningkatan penegakan perda dan perkada;
2. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Satgas Linmas yang ada di desa/kelurahan belum terbentuk;
4. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbatas;

5. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi;
6. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan.
7. Kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS masih rendah;

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaraan atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan mencakup pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar turut mendukung tercapainya visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu ***“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”***.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.
2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

3. Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP .
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara.
5. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana jangka menengah daerah pemerintah kabupaten kepulauan selayar, maka satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten kepulauan selayar pada periode 5 (lima) tahun ke depan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya dan pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya yang dimuat dalam tabel 4.1 dan Perubahan indikator kinerjanya yang di muat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (T-1)		Indeks Akuntabilitas Kinerja OPD	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Nilai SAKIP (S-1)	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB
				59,05	63,21	68,43	75,68	79,06
			Perencanaan Kinerja	14,53	15,52	16,78	19,89	20,69
			Pengukuran Kinerja	13,81	14,56	15,87	17,76	18,63
			Pelaporan Kinerja	12,00	12,53	13,03	13,68	14,05
			Evaluasi Internal	4,51	5,05	5,89	6,32	7,02
			Capaian Kinerja	14,20	15,55	16,86	18,03	18,67
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (S-2)	Indeks Kepuasan Layanan	0,6700	0,6700	0,6750	0,6800	0,6900
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (S-3)	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		

2.	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)		Persentase tindak lanjut pelanggaran gangguan trantibum, perda dan perkara	97%	97%	99%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara (S-4)	Persentase penegakan perda	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	95%	95%	98%	100%	100%
			Cakupan Petugas Linmas	1,48%	1,48%	1,49%	1,51%	1,52%
3	Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)		Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	80%	85%	85%	90%	95%
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (S-5)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%	26,45%	27,78%	34,85%	35,29%
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89%	90%	90%	95%	95%

Tabel 4.2.
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	95%	95%	98%	100%	100%
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara (S-4)	Persentase penegakan perda	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Petugas Linmas	1,48%	1,48%	1,49%	1,51%	1,52%
2.	Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%	26,46%	27,78%	34,85%	35,29%
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (S-5)	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89%	90%	90%	95%	95%

3	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (T-1)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	CC	B	B	BB	BB
				59,05	63,21	68,43	75,69	79,06
			Indeks Kepuasan Layanan	72,2	75	77	79	80
			Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar :

FAKTOR INTERNAL :

a. KEKUATAN (*Strengths*), Antara Lain terdiri dari :

1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2. Adanya dukungan terhadap PPNS
3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

b. KELEMAHAN (*Weaknesses*), Antara Lain terdiri dari :

1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompentensi PPNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

a. PELUANG (*Opportunities*), Antara Lain terdiri dari :

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain
3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

c. ANCAMAN (*Threats*) , Antara Lain terdiri dari :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada
3. Adanya potensi gangguan trantibum

Tabel 5.1

Analisa SWOT Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Adanya dukungan terhadap PPNS	Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompotensi PPNS
FAKTOR EKSTERNAL	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
PELUANG (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan	Memberdayakan masyarakat sesuai peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai peraturan perundang-undangan
Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan	Memaksimalkan kemampuan personil Satpol PP dalam berkoordinasi dengan pihak lain guna tercapainya pelaksanaan tugas yang optimal
Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penegakan perda dan perkada	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam menciptakan ketentraman di masyarakat
ANCAMAN (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda	Pemberian sosialisasi tentang aturan-aturan dalam penegakan perda oleh Satpol PP	Peningkatan kualitas dan kompetensi Satpol PP dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penegakan perda
Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkada	Dengan dukungan yang kuat terhadap PPNS akan menciptakan personil yang profesional dalam mengawal Perda dan Perkada	Peningkatan kemampuan personil Satpol PP yang berkompotensi PPNS menjadi lebih profesional dalam mengawal perda dan perkada

Adanya potensi gangguan trantibum	Meningkatkan penegakan perda dan perkara sehingga mencegah terjadinya gangguan trantibum	Mencegah terjadinya gangguan trantibum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada
-----------------------------------	--	--

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut ;

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik (T-1)	1 Meningkatkan Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
	3 Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan evaluasi terhadap perencanaan anggaran
Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)	1 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Personil Satpol PP	Peningkatan kesejahteraan pegawai Satpol PP sebagai penunjang kinerja Anggota Satpol PP
		Mengembangkan keahlian personil Satpol PP berkompentensi PPNS	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas PPNS Peningkatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada

		Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap penerapan Peraturan Daerah serta pemberdayaan masyarakat taat hukum Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan perda dan perkada
		Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peningkatan pembinaan dan pemantapan informasi berbagai produk hukum dalam kehidupan sosial masyarakat guna terciptanya aparaturnya dan masyarakat sadar hukum Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat
		Meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan membentuk Satgas Linmas di desa/kelurahan	Peningkatan perlindungan masyarakat dengan meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum
MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran Membentuk Pos PMK di semua kecamatan	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengaduan bencana kebakaran Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran

Tabel 5.3
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (T-1)	1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
		Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan evaluasi terhadap perencanaan anggaran
Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif (T-2)	1 Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Personil Satpol PP	Peningkatan kesejahteraan pegawai Satpol PP sebagai penunjang kinerja Anggota Satpol PP
		Mengembangkan keahlian personil Satpol PP berkompetensi PPNS	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas PPNS Peningkatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada

		Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap penerapan Peraturan Daerah serta pemberdayaan masyarakat taat hukum Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan perda dan perkada
		Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peningkatan pembinaan dan pemantapan informasi berbagai produk hukum dalam kehidupan sosial masyarakat guna terciptanya aparatur dan masyarakat sadar hukum Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat
		Meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan membentuk Satgas Linmas di desa/kelurahan	Peningkatan perlindungan masyarakat dengan meminimalisir gangguan serta pelanggaran hukum
MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (T-3)	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Meningkatkan penanggulangan bencana kebakaran Membentuk Pos PMK di semua kecamatan	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengaduan bencana kebakaran Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran

Sebagaimana digambarkan dalam Visi dan Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu Program Prioritas yang terdiri dari Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan.

Program Prioritas terdiri atas:

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Unggulan yaitu:

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tabel 5.2 diatas, peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mendukung Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) dari bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021-2026 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada SKPD;
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
- 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
- 8) Pemindahan Tugas ASN;
- 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Penyediaan Bahan Material;

- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 9) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Alat Besar;
- 4) Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor;
- 5) Pengadaan Mebel;
- 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pengadaan Aset tetap Lainnya;
- 8) Pengadaan Aset tak Berwujud;
- 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
- 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyedia Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar;
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;

- 5) Pemeliharaan Mebel;
- 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;
- 8) Pemeliharaan Aset tak Berwujud;
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 12) Pemeliharaan atau Rehabilitasi Tanah.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
- 2) Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum;

8) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

9) Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;

3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupten/Kota;

2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;

4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

5) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

6) Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

7) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

8) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);

9) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- 1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran;
- 2) Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.

c. Investigasi Kejadian Kebakaran

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat;
- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia;
- 2) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah (T-1)	Meningkatnya Nilai SAKIP Satpol PP Damkar (S-1)	01	2.01	01	Program Peningkat Uraian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Presentase Capaian Kinerja %	50.91	63.03		70.28		70.53		71.51		72.31		100					
	Presentase Capaian Kinerja Keuangan %					79.35	99.47		85		88		91		95		99.5						
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (S-2)	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	47,250,000	100%	48,195,000	100%	49,640,850	100%	49,640,850				
		01	2.01	01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,500,000	2 Dokumen	10,710,000	2 Dokumen	11,031,300	2 Dokumen	11,031,300				
		01	2.01	02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Output : jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,355,000	1 dokumen	5,515,650	1 dokumen	5,515,650				
		01	2.01	03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA yang disusun																	
		01	2.01	04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	5,355,000	1 Dokumen	5,515,650	1 Dokumen	5,515,650				
		01	2.01	05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Output : jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,250,000	1 dokumen	5,355,000	1 dokumen	5,515,650	1 dokumen	5,515,650				
		01	2.01	06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Output : jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,500,000	1 Laporan	10,710,000	1 Laporan	11,031,300	1 Laporan	11,031,300				
		01	2.01	07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,500,000	3 Laporan	10,710,000	3 Laporan	11,031,300	3 Laporan	11,031,300				
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Presentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	4,219,502,906	100%	4,222,143,506	100%	4,433,250,681	100%	4,436,211,490	100%	4,569,297,834	100%	4,569,297,834				
		01	2.02	01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	4,126,482,906	12 bulan	4,126,482,906	12 bulan	4,332,807,051	12 bulan	4,332,807,051	12 bulan	4,462,791,263	12 bulan	4,462,791,263				
		01	2.02	02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Honorarium PNS yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	88,020,000	12 Bulan	90,660,600	12 Bulan	95,193,630	12 Bulan	98,049,439	12 Bulan	100,990,921	12 Bulan	100,990,921				
		01	2.02	03	3 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output : Jumlah dokumen penata usahan yang diuji/verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-				
		01	2.02	04	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-				

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			01	2.02	05	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000,000	5.000,000	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250,000	5.355,000	1 Dokumen	1 Dokumen	5.515,650	5.515,650	1 Dokumen	1 Dokumen	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.02	06	6	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output : Jumlah dokumen/bahan tanggapan di periksa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.02	07	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulnan/Semesteran SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/trivulnan/semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.02	08	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah dokumen realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Subag Keuangan	
			01	2.03	01	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen barang milik daerah SKPD yang terencana dan terusun		80%	-	-	80%		-	-	80%		-	-	80%		Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.03	02	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen BMD SKPD yang diamankan		1 Paket	-	-	1 Paket		-	-	1 Paket		-	-	1 Paket		Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.03	03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah dokumen BMD SKPD yang dinilai		52 orang	-	-	52 orang		-	-	52 orang		-	-	52 orang		Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.03	04	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada SKPD	Output :		2 orang	-	-	2 orang		-	-	2 orang		-	-	2 orang		Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar
								Outcome :																
			01	2.03	05	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen		90%	-	90%		-	-	90%		-	-	90%		Subag Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
						Outcome :																			
			01	2.05	08	8 Pemindahan Tugas ASN	Output :																		
						Outcome :																			
			01	2.05	09	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output :	Presentase Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan	100%	-	100%	100,000,000	100%	-	100%	120,000,000	100%	-	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar	
						Outcome :																			
			01	2.05	10	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output :	Presentase meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	Kab. Kepulauan Selayar		
						Outcome :																			
			01	2.05	11	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output :	meningkatnya pengetahuan tentang implementasi	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	Kab. Kepulauan Selayar		
						Outcome :																			
			01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%	100%	554,199,935	100%	623,473,325	100%	577,032,909	100%	588,523,524	100%	613,547,759	100%	613,547,759	100%	613,547,759	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum		
			01	2.06	01	1 Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Output :	Peralatan Instalasi Listrik	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,472,974	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
						Outcome :																			
			01	2.06	02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Output :	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	21,420,000	100%	22,062,600	100%	22,062,600	100%	22,062,600	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
						Outcome :																			
			01	2.06	03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output :	Terpenuhiya kebutuhan alat-alat kantor yang siap pakai	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Kab. Kepulauan Selayar	
						Outcome :																			
			01	2.06	04	4 Penyediaan Logistik Kantor	Output :	Terpenuhiya Logistik Kantor															Kab. Kepulauan Selayar		
						Outcome :																			
			01	2.06	05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output :	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	31,220,000	100%	31,220,000	100%	31,220,000	100%	31,844,400	100%	32,799,732	100%	32,799,732	100%	32,799,732	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
						Outcome :																			
			01	2.06	06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output :	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	100%	7,920,000	100%	7,920,000	100%	7,920,000	100%	8,078,400	100%	8,320,752	100%	8,320,752	100%	8,320,752	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
							Outcome :																				
			01	2.06	07	7	Persediaan Bahan Material	Output : Terpenuhiya bahan material kantor																	Kab. Kepulauan Selayar		
							Outcome :																				
			01	2.06	08	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Output : Jumlah tamu yang difasilitasi	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,400,000	100%	21,012,000	100%	21,012,000	100%	21,012,000	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar		
							Outcome :																				
			01	2.06	09	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kehar daerah yang digunakan	Output : Persentase SPDP dalam dan kehar daerah yang digunakan	90%	90%	468,809,935	90%	538,083,325	90%	490,169,935	90%	500,505,724	90%	519,590,078	90%	519,590,078	90%	519,590,078	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar		
							Outcome :																				
			01	2.06	10	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Output : Penatausahaan administrasi perkantoran	100%	100%	1,250,000	100%	1,250,000	100%	1,250,000	100%	1,275,000	100%	4,762,597	100%	4,762,597	100%	4,762,597	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar		
							Outcome :																				
			01	2.06	11	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Output : Absensi pegawai Sat POL PP Dinkar dan Penyelamatan	90%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
							Outcome :																				
			01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	71,360,000	100%	40,000,000	100%	60,729,395	100%	52,875,274	100%	55,450,329	100%	55,450,329	100%	55,450,329	Subag Umum, Keggawain dan Hukum			
			01	2.07	01	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : tersedianya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
							Outcome :																				
			01	2.07	02	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar
							Outcome :																				
			01	2.07	03	3	Pengadaan Alat Besar	Output :																			
							Outcome :																				
			01	2.07	04	4	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Output :																			
							Outcome :																				
			01	2.07	05	5	Pengadaan Mebel	Output : lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	30,680,000	100%	-	100%	10,729,395	100%	12,875,274	100%	15,450,329	100%	15,450,329	100%	15,450,329	Subag Umum, Keggawain dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi								
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
							Jumlah kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS	24 Kali	24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali		24 Kali								
							Outcome : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota																	Bidang Penegakan Peraturan Daerah					
		1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Output : Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti Diklat, jumlah rakor PPNS	2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali		2 orang, 2 kali				Megamendung Bogor				
							Outcome : Program Pemegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Outcome : Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	91.11	91.11	91.55		91.70		91.85		92.00		92.00		92.00		243,586,053	243,586,053	Bidang Pemadam Kebakaran	Kab. Kepulauan Selayar			
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (F-3)	Meningkatnya keselamatan dalam masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (S-4)	1	05	04			Pencegahan, Penyelidikan, Penanganan, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang ditangani	91.11	90	90		90		90		90		90		90		197,546,053	197,546,053	Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomani, Kec. Bontomatene, Kec. Bontotuwaha, Kec. Bontotuwaha			
								Presentase Potensi Terjadinya Kebakaran yang dicegah dan dikendalikan	80	80	80		80		80		80		80		80								
		1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran yang dilaksanakan	6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan				Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomani, Kec. Bontomatene, Kec. Bontotuwaha, Kec. Bontotuwaha			
								Outcome :																					
		1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran yang dilaksanakan	36	36	105,640,000		36		108,640,000		36		112,614,000		36		115,614,000	36	115,614,000	Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomani, Kec. Bontomatene, Kec. Bontotuwaha, Kec. Pasimsunggu		
								Outcome :																					
		1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari non kebakaran	Output : Jumlah Korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	36	36	31,021,333		36		31,082,435		36		33,485,796		36		35,085,532	36	36,086,053	36	36,086,053	Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomani, Kec. Bontomatene, Kec. Bontotuwaha, Kec. Pasimsunggu
								Outcome :																					
		1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
								Outcome :																					
		1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Ahli Pelindung Diri	Output : Jumlah sarana dan prasarana yang distandarisasi	5 unit	5 unit	12,500,000		5 unit		12,500,000		5 unit		12,500,000		5 unit		12,500,000	5 unit	12,500,000	Bidang Pemadam Kebakaran	Kab. Kepulauan Selayar		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		1	05	04	2.01	06	6	Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Output : Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang diadakan	10 APD dan perlengkapan pemadaman	5 APD dan perlengkapan pemadaman	30,000,000	5 APD dan perlengkapan pemadaman	30,000,000	5 APD dan perlengkapan pemadaman	31,670,000	5 APD dan perlengkapan pemadaman	31,670,000	5 APD dan perlengkapan pemadaman	33,346,000	5 APD dan perlengkapan pemadaman	33,346,000	Bidang Pemadam Kebakaran	4 kecamatan Kec. Benteng, Kec. Kec. Bontomatene, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasiangsunggu
		1	05	04	2.01	07	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Output : Jumlah aparaturnya yang dibina	0	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		Jakarta	
		1	05	04	2.01	08	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIK)	Output :															
		1	05	04	2.01	09	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Output :															
		1	05	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana yang diinspeksi	100%	100%	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.02	01	1	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Output : Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang didata	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	6 unit mobil, 20 tabung apar, 6 pompa alcon	4,000,000	Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomatene, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasiangsunggu
		1	05	04	2.02	02	2	Pembelian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Output : Jumlah sarana dan prasarana yang dinilai														Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.03			Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100%	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	17,040,000	Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.03	01	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Output : Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	36	36	17,040,000	36	17,040,000	36	17,040,000	36	17,040,000	36	17,040,000	36	17,040,000	Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomatene, Kec. Bontomatene, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasiangsunggu
		1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	100%	100%	23,400,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Bidang Pemadam Kebakaran	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4(2025)		Tahun-5 (2026)				Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		1	05	04	2.04	01	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Output : Jumlah masyarakat yang diberikan edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana	300 Orang	600 orang	23,400,000	600 orang	25,000,000	600 orang	25,000,000			Bidang Pemadam Kebakaran	Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Buki, Kec. Bontomani, Kec. Bontomatene, Kec. Bontosukayu,							
		1	05	04	2.04	02	2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Outcome : Output : Melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pedaman kebakaran di desa dan kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan			Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.04	03	3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Outcome : Output : Menyapkan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan		11 kecamatan			Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase penyelamatan kejadian yang membahayakan keselamatan manusia																	Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05	01	1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan atau Mengancam Keselamatan Manusia	Output : Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko			Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05	02	2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan	Outcome : Output :																	Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05	03	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Outcome : Output : Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasi pencarian dan penyelamatan		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko			Bidang Pemadam Kebakaran	
		1	05	04	2.05	04	4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan evakuasi	Outcome : Output : Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko		4 posko			Bidang Pemadam Kebakaran	
							Outcome :			10,550,870,000		10,695,311,410		10,963,015,055		11,226,017,786		11,493,870,570		11,493,870,570						

Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	CC		B		B		BB		BB		BB		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai Sakip OPD	CC	CC		B		B		BB		BB		BB		
				Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	0	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		
				Indeks Kepuasan Layanan	0	72.2		75		77		79		80		80		
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50.91	63.03	9,922,439,041	70.28	10,058,277,231	70.53	10,310,035,911	71.51	10,557,373,672	72.31	10,809,272,608	72.31	51,657,398,463	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	83		85		88		91		95		95		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	45,000,000	100	45,000,000	100	47,250,000	100	48,195,000	100	49,640,850	100	235,085,850	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,500,000	2	10,710,000	2	11,031,300	10	52,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,355,000	1	5,515,650	5	26,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,355,000	1	5,515,650	5	26,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,355,000	1	5,515,650	5	26,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	10,710,000	1	11,031,300	5	52,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,500,000	3	10,710,000	3	11,031,300	15	52,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	4,219,502,906	100	4,222,143,506	100	4,427,252,431	100	4,430,211,489	100	4,563,297,834	100	21,862,408,166	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	4,126,482,906	46	4,126,482,906	46	4,332,808,931	46	4,332,807,050	46	4,462,791,263	229	21,381,373,056	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	88,020,000	1	90,660,600	12	7,000,000	12	88,049,439	12	90,990,921	38	364,720,960	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	78,193,500	0	0	0	0	1	78,193,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,355,000	1	5,515,650	5	26,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	0	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	0	100	0	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang MilikDaerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	100	24,476,200	100	104,476,200	100	6,474,100	100	126,565,724	100	66,702,696	100	328,694,920	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1,002,000	12	1,002,000	12	1,001,000	12	1,022,040	10	1,052,701	58	5,079,741	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	23,474,200	12	3,474,200	12	3,473,100	12	3,543,684	12	3,649,995	60	37,615,179	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200	0	0	200	100,000,000	0	0	200	120,000,000	200	60,000,000	600	280,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	100	554,199,935	100	623,473,325	100	577,965,000	100	598,523,524	100	613,547,759	100	2,967,709,543	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	6	5,435,700	6	5,000,000	6	5,000,000	20	25,435,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	6	21,002,200	6	21,420,000	6	22,062,600	20	104,484,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	1	1	31,220,000	1	31,220,000	12	31,219,600	12	31,844,400	12	32,799,732	38	158,303,732	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	7,920,000	1	7,920,000	12	7,920,000	12	8,078,400	12	8,320,752	38	40,159,152	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	12	19,998,800	12	20,400,000	12	21,012,000	38	101,410,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	468,809,935	1	538,083,325	12	491,139,300	12	510,505,724	2	519,590,078	28	2,528,128,362	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1,250,000	1	1,250,000	12	1,249,400	12	1,275,000	12	4,762,597	38	9,786,997	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100	100	71,360,000	100	40,000,000	100	60,727,000	100	72,875,274	100	79,450,329	100	324,412,603	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotoryang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	30,680,000	0	0	1	10,728,200	1	12,875,274	1	15,450,329	4	69,733,803	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	40,680,000	1	40,000,000	5	49,998,800	5	60,000,000	5	64,000,000	17	254,678,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	4,586,960,000	100	4,586,960,000	100	4,728,684,580	100	4,823,259,516	100	4,967,977,701	100	23,693,841,797	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	500,000	1	500,000	12	999,500	12	1,020,000	12	1,071,000	38	4,090,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	181,600,000	1	181,600,000	12	190,680,000	12	194,493,600	12	200,328,408	38	948,702,008	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4,404,860,000	1	4,404,860,000	12	4,537,005,080	12	4,627,745,916	12	4,766,578,293	38	22,741,049,289	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	420,940,000	100	436,224,200	100	457,682,800	100	453,743,145	100	464,655,439	100	2,233,245,584	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	34,541,000	1	35,000,000	1	36,130,000	1	36,771,000	1	37,874,130	5	180,316,130	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	296,404,000	1	311,224,200	27	349,340,000	27	326,972,145	27	336,781,309	83	1,620,721,654	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	49,995,000	1	50,000,000	1	49,922,800	1	50,000,000	1	50,000,000	5	249,917,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	40,000,000	51	40,000,000	51	22,290,000	51	40,000,000	51	40,000,000	205	182,290,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		0.00.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	95	95		95		98		100		100		100		
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan pekada			Persentase penegakan perda	100	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Petugas Linmas	1.48	1.48		1.48		1.49		1.51		1.52		1.52		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	404,829,626	100	410,371,744	100	420,643,348	100	430,734,582	100	441,011,909	99	2,107,591,209	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan pekada	100	100		100		100		100		100		100		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban yang ditangani	97	97	208,521,333	97	211,375,990	97	216,666,730	97	221,864,619	97	227,158,253	97	1,085,586,925	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kasus)	24	24	168,500,000	24	170,806,765	24	175,082,058	24	179,282,331	24	183,559,952	120	877,231,106	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)	5	2,500,000	5	2,534,225	5	2,597,657	5	2,659,975	5	2,723,442	25	13,015,299	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	29,000,000	1	29,397,010	1	30,132,817	1	30,855,703	1	31,591,920	5	150,977,450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1	8,521,333	1	8,637,990	1	8,854,198	1	9,066,610	1	9,282,939	5	44,363,070	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	90	196,308,293	90	198,995,754	90	203,976,618	90	208,869,963	90	213,853,656	90	1,022,004,284	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)	1	79,445,000	1	80,532,602	36	82,548,333	36	84,528,667	36	86,545,521	110	413,600,123	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Laporan)	4	116,863,293	4	118,463,152	18	121,428,285	18	124,341,296	18	127,308,135	62	608,404,161	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta PenegakanPerda dan Perkada (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26.23	26.23	26.46	27.78	34.85	35.29	35.29							
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89	89	90	90	95	95	95							
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Waktu Tanggap (Response Time) Penangan Kebakaran	91.1	100	223,601,333	100	226,662,435	100	232,335,796	100	237,909,532	100	243,586,053	99	1,164,095,149	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan	80	80	179,161,333	80	180,622,435	80	186,295,796	80	191,869,532	80	197,546,053	80	935,495,149	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pengulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	105,640,000	1	107,040,000	12	108,640,000	12	112,614,000	12	115,614,000	38	549,548,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	31,021,333	1	31,082,435	12	33,485,796	12	35,085,532	12	36,086,053	38	166,761,149	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sab, danLegal (Dokumen)	1	1	12,500,000	1	12,500,000	4	12,500,000	4	12,500,000	4	12,500,000	14	62,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	10	10	30,000,000	10	30,000,000	10	31,670,000	10	31,670,000	10	33,346,000	50	156,686,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi (Desa/Kelurahan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	100	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem ProteksiKebakaran (Dokumen)	1	1	4,000,000	1	4,000,000	10	4,000,000	10	4,000,000	10	4,000,000	32	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana ProteksiKebakaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang di Investigasi	100	100	17,040,000	100	17,040,000	100	17,040,000	100	17,040,000	100	17,040,000	100	85,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran (Dokumen)	1	1	17,040,000	1	17,040,000	12	17,040,000	12	17,040,000	12	17,040,000	38	85,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase kegiatan Pemberdayaan dalam pencegahan Kebakaran	100	100	23,400,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	123,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	300	300	23,400,000	300	25,000,000	300	25,000,000	300	25,000,000	300	25,000,000	1500	123,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Saranadan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia DukunganSapas Damkar (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Total						10,550,870,000	10,695,311,410	10,963,015,055	11,226,017,786	11,493,870,570	54,929,084,821							

Tabel 6.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Kemandagri nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	-	-	-	-	B		BB		BB		BB		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai Sakip OPD	CC	-	-	-	-	B		BB		BB		BB		
				Laporan Keuangan OPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	0	-	-	-	-	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		
				Indeks Keputuasan Layanan	0	-	-	-	-	77		79		80		80		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50.91	-	-	-	-	70.53		71.51		72.31		72.31		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	-	-	-	-	88	10,310,035,911	91	10,557,373,672	95	10,809,272,608	95	51,657,398,463	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	47,250,000	100%	48,195,000	100%	49,640,850	100%	145,085,850	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	10,500,000	2 Dokumen	10,710,000	2 Dokumen	11,031,300	6 Dokumen	32,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	5,355,000	1 Dokumen	5,515,650	3 Dokumen	16,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	5,355,000	1 Dokumen	5,515,650	3 Dokumen	16,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	5,355,000	1 Dokumen	5,515,650	3 Dokumen	16,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	10,500,000	1 Laporan	10,710,000	1 Laporan	11,031,300	3 Laporan	32,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	10,500,000	3 Laporan	10,710,000	3 Laporan	11,031,300	9 Laporan	32,241,300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	4,427,252,431	100%	4,430,211,489	100%	4,563,297,834	100%	13,420,761,754	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	-	-	-	-	46 Orang/Bulan	4,332,808,931	46 Orang/Bulan	4,332,807,050	46 Orang/Bulan	4,462,791,263	138 Orang/Bulan	13,128,407,244	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	7,000,000	12 Dokumen	88,049,439	12 Dokumen	90,990,921	36 Dokumen	186,040,360	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	78,193,500	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	78,193,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	5,250,000	1 Laporan	5,355,000	1 Laporan	5,515,650	3 Laporan	16,120,650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-5 (2026)		
						(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	3 Laporan	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	3 Laporan	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	3 Laporan	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100%	-	-	-	-	100%	6,474,100	100%	126,565,724	100%	66,702,696	100%	199,742,520	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	6,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	1,001,000	12 Dokumen	1,022,040	10 Dokumen	1,052,701	34 Dokumen	3,075,741	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	3,473,100	12 Dokumen	3,543,684	12 Dokumen	3,649,995	36 Dokumen	10,666,779	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pegawai	-	-	-	-	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	Pegawai	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	ASN	-	-	-	-	ASN	-	ASN	-	ASN	-	ASN	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-12 (2027)			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
		01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	-	-	-	-	0	-	200 Orang	120,000,000	200 Orang	60,000,000	400 Orang	180,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penenuhan administrasi umum kantor	100%	-	-	-	-	100%	577,965,000	100%	598,523,524	100%	613,547,759	100%	1,790,036,283	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	6 Paket	5,435,700	6 Paket	5,000,000	6 Paket	5,000,000	18 Paket	15,435,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	6 Paket	21,002,200	6 Paket	21,420,000	6 Paket	22,062,600	18 Paket	64,484,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	12 Paket	31,219,600	12 Paket	31,844,400	12 Paket	32,799,732	36 Paket	95,863,732	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	-	-	12 Paket	7,920,000	12 Paket	8,078,400	12 Paket	8,320,752	36 Paket	24,319,152	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	19,998,800	12 Dokumen	20,400,000	12 Dokumen	21,012,000	36 Dokumen	61,410,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	491,139,300	12 Dokumen	510,505,724	2 Dokumen	519,590,078	26 Dokumen	1,521,235,102	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	1,249,400	12 Dokumen	1,275,000	12 Dokumen	4,762,597	36 Dokumen	7,286,997	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	-	-	-	-	100%	60,727,000	100%	72,875,274	100%	79,450,329	100%	213,052,603	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	10,728,200	1 Paket	12,875,274	1 Paket	15,450,329	3 Paket	39,053,803	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-6 (2027)				
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	5 Unit	49,998,800	5 Unit	60,000,000	5 Unit	64,000,000	15 Unit	173,998,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	100%	4,728,684,580	100%	4,823,259,516	100%	4,967,977,701	100%	14,519,921,797	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	999,500	12 Laporan	1,020,000	12 Laporan	1,071,000	36 Laporan	3,090,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	190,680,000	12 Laporan	194,493,600	12 Laporan	200,328,408	36 Laporan	585,502,008	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	4,537,005,080	12 Laporan	4,627,745,916	12 Laporan	4,766,578,293	36Laporan	13,931,329,289	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	457,682,800	100%	453,743,145	100%	464,655,439	100%	1,376,081,384	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	36,130,000	1 Unit	36,771,000	1 Unit	37,874,130	3 Unit	110,775,130	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	-	-	-	-	27 Unit	349,340,000	27 Unit	326,972,145	27 Unit	336,781,309	81 Unit	1,013,093,454	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	49,922,800	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	3 unit	149,922,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	51 Unit	22,290,000	51 Unit	40,000,000	51 Unit	40,000,000	153 Unit	102,290,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		01 2.09 0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	-	-	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)						
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Menciptakan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	95%	-	-	-	-	98%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada			Persentase penegakan perda	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
				Cakupan Petugas Linmas	1,48%	-	-	-	-	1,49	-	1,51	-	1,52	-	1,52	-			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Tranibumyangdapat diselesaikan	100%	-	-	-	-	100%	420,643,348	100%	430,734,582	100%	441,011,909	99%	2,107,591,209	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	100%	-	-			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan yang ditangani	97%	-	-	-	-	97%	216,666,730	97%	221,864,619	97%	227,158,253	97%	665,689,602	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	30,132,817	1 Dokumen	30,855,703	1 Dokumen	31,591,920	3 Dokumen	92,580,440	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-12 (2028)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
		1.05.02.2.01.0014	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 Laporan	-	-	-	-	24 Dokumen	175,082,058	24 Dokumen	179,282,331	24 Dokumen	183,559,952	120 Dokumen	537,924,341	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	2,597,657	5 Laporan	2,659,975	5 Laporan	2,723,442	15 Laporan	7,981,074	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	8,854,198	1 Laporan	9,066,610	1 Laporan	9,282,939	3 Laporan	27,203,747	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	90%	-	-	-	-	90%	203,976,618	90%	208,869,963	90%	213,853,656	90%	626,700,237	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0008 D	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	-	-	-	-	18 Laporan	121,428,285	18 Laporan	124,341,296	18 Laporan	127,308,135	54 Dokumen	373,077,716	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	-	-	-	-	36 Laporan	82,548,333	36 Laporan	84,528,667	36 Laporan	86,545,521	108 Laporan	253,622,521	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.03	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pembinaan Penyidik	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-5 (2026)		
						(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 3.05	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 3.05 0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	-	-	-	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 3.05 0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	-	-	-	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 4.05	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 4.05 0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	-	-	-	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 02 4.05 0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	-	-	-	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23	-	-	-	-	27,78	-	34,85	-	35,29	-	35,29	-	
	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89	-	-	-	-	90	-	95	-	95	-	95	-	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	91.1	-	-	-	-	100	228,335,796	100	237,909,532	100	243,586,053	99	1,164,095,149	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	11.95	-	-	-	-	10.61		10.3		10		10		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan	80%	-	-	-	-	80%	186,295,796	80%	191,869,532	80%	197,546,053	80%	599,711,381	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	108,640,000	12 Laporan	112,614,000	12 Laporan	115,614,000	36 Laporan	336,868,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-12 (2028)		
						(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1 05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	33,485,796	12 Dokumen	35,085,532	12 Dokumen	36,086,053	36 Dokumen	104,657,381	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	12,500,000	4 Dokumen	12,500,000	4 Dokumen	12,500,000	12 Dokumen	37,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	-	-	-	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	-	-	-	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1.05.04.2.01.016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	31,670,000	10 Unit	31,670,000	10 Unit	33,346,000	30 Unit	96,686,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Tahun-12 (2027)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
		1 05 04 2.01 0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kamitiran dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.01 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	-	-	-	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran yang di Inspeksi	100%	-	-	-	-	100%	4,000,000	100	4,000,000	100%	4,000,000	100%	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem ProteksiKebakaran	1 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	4,000,000	10 Dokumen	4,000,000	10 Dokumen	4,000,000	30 Dokumen	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang di Investigasi	100%	-	-	-	-	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	17,040,000	100%	51,120,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	17,040,000	12 Dokumen	17,040,000	12 Dokumen	17,040,000	36 Dokumen	51,120,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase kegiatan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	100%	-	-	-	-	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	123,400,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	300 Orang	-	-	-	-	300 Orang	25,000,000	300 Orang	25,000,000	300 Orang	25,000,000	1500 Orang	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	-	-	-	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	Desa/Kelurahan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.04 0003 D	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelamatan Kejadian yang membahayakan keselamatan manusia	0%	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.05 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Memimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.05 0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.05 0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan	-	-	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		1 05 04 2.05 0005	Pengamanan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	-	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											10,959,015,055		11,226,017,786		11,493,870,570		54,929,084,821	

Tabel 6.4
Program Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	TAHUN PELAKSANAAN					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6								
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6								
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Mobil Pemadam, 2 Motor patwal, 2 motor operasional	5	2	2	1	1		10,660,000,000	APBD Provinsi	

Keterangan:

1. Program yang mendukung program stretegis ^{2) 3)}
2. Program yang mendukung program pendukung ^{2) 3))}
3. Program yang mendukung pencapaian SPM ^{2) 3)}
4. Program yang mendukung pencapaian SKIK ³⁾
5. Program yang mendukung investasi pembangunan ¹⁾

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan5 Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	100

3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	91,11	91,41	91,55	91,70	91,85	92	92
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,95	11,26	10,93	10,61	10,30	10	10

Adapun penetapan target indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada target indikator SPM RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Target Nasional	Target Capaian Setiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan



Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Benteng, 01 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

SAPARUDDIN, S. Sos., M.M
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19760901 200502 1 004

